

Judul : Kawal Pengesahan RUU TPKS
Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Kawal Pengesahan RUU TPKS

KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini mengatakan Nasdem konsisten untuk terus mengawal RUU TPKS sampai akhirnya disahkan menjadi UU disahkan sesuai komitmen DPR. "Kami akan mengawal dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan komitmen DPR dalam paripurna hari ini (kemarin)," katanya.

Amelia menerangkan langkah taktis perlu dilakukan agar tidak ada lagi upaya untuk menggagalkan RUU TPKS. "RUU TPKS sifatnya sangat urgen. Kaitannya sangat sistemik dalam hukum positif di Indonesia, di mana

RUU ini akan mengubah paradigma dan penanganan hukum bagi korban kekerasan seksual," terangnya.

Senada, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menegaskan pihaknya tetap konsisten mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"Kami menyambut dengan segenap pengharapan dan terus mengetuk hati nurani pimpinan dan anggota DPR RI untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR mengharap alat ke-

lengkapan dewan (AKD) yang akan membahas RUU TPKS segera ditetapkan.

"Karena biar surpres (surat presiden) turun langsung *go a head* (dibahas)," kata dia, kemarin.

Anggota Komisi XI itu mengusulkan agar pembahasan dikembalikan ke Badan Legislasi (Baleg). Pasalnya, draf RUU TPKS disusun Baleg.

Apalagi, komunikasi antara Baleg dan pemerintah sudah terjalin semenjak penyusunan draf RUU TPKS. Willy berharap tidak ada banyak hal yang berubah dalam daftar inventaris masalah (DIM) yang diberikan pemerintah.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa memastikan AKD yang akan membahas RUU TPKS karena tergantung masukan dari pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di DPR. Namun, dia menginginkan penentuan AKD mempertimbangkan percepatan pembahasan. Karena itu, RUU TPKS bisa disahkan dalam waktu dekat.

"Kita lihat besok, mana yang cepat sajalah. Mana yang cepat dan cermat," ungkap dia.

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan kelancaran pembahasan sangat dibutuhkan. Pasalnya, bakal beleid tersebut sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini yang mana aksi kekerasan seksual marak terjadi. "Karena ini udah tuntutan masyarakat," ujar dia. (Sru/Medcom/H-3)